

ABSTRAK

Sri Apridayani : Politik Anggaran Penurunan Angka *Stunting* dalam Pembagian Porsi Dana Desa dan Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi bahwa pendanaan bagi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten dan Kecamatan bersumber dari APBD, APBDes, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022, dana desa yang dianggarkan untuk penurunan angka *stunting* oleh masing-masing desa ditargetkan sebesar 8%, sedangkan anggaran dari APBD Kabupaten Sumedang tidak secara eksplisit berkontribusi dalam penurunan angka *stunting*. Namun, dengan tidak diketahuinya alokasi anggaran, Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 berhasil menurunkan angka *stunting* tertinggi se-Indonesia menjadi 8,27%. Penelitian ini menggunakan teori politik anggaran dari Andy Norton dan Diane Elson dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur kepada sepuluh informan, observasi nonpartisipan, dan studi dokumen. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan berdasarkan teori yang digunakan sudah optimal. Namun, masih terdapat dua dimensi yang belum berjalan optimal, yakni: Pertama, masih terdapat anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang belum memberikan pemberitahuan resmi secara merata kapan dan di mana akan dilaksanakannya reses sehingga masih terdapat kepala desa yang belum mengetahui kabar resmi pelaksanaan reses di wilayahnya, hal ini karena masalah kepentingan politik. Kedua, keterlibatan masyarakat sebatas pemberi masukan untuk menambah pengkayaan kajian.

Kata kunci : *anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana desa, politik anggaran, stunting*